PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

UNIT KERJA : **SEKRETARIAT DPRD**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JHON AQUARIUS PUTRA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **179303**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 540.000.000**

1. Tanah Seluas 1735 m2 di KAB / KOTA NATUNA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 707 m2 di KAB / KOTA NATUNA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/135 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 53.240.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 24.880.000
2. MOTOR, YAMAHA LEXI SEPEDA MOTOR Tahun 2018, LAINNYA Rp. 23.860.000
3. LAINNYA, MOBOT SKUTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 11.400.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 369.681.596**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**974.321.596**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**974.321.596**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.